

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI NEGERI PELAUW KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Ahmad Rosandi Sakir<sup>1</sup>, Yusriah Amaliah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pattimura, Universitas Hasanuddin

Email: Ahmadronsandi8@gmail.com, yusriahamaliah@gmail.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pemerintah negeri dalam upaya Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di negeri pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Teknik yang di pakai dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara, beberapa aparat pemerintah Negeri dan masyarakat Negeri Pelauw. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah berupa dokumen, artikel, dan buku yang mendukung penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pemerintah negeri dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Negeri Pelauw belum berjalan dengan maksimal. Dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sendiri masih kewalahan dalam pembangunan karena kurangnya sumber daya manusia dan tradisi dari Negeri Pelauw sendiri yang menjadi penghambat serta kurangnya tingkat kerja sama antara Pemerintah Negeri Pelauw dan masyarakat, Sehingga pembangunan di negeri Pelauw Menjadi Tertunda. Sehingga perlu adanya perhatian penuh dari Pemerintah Negeri Pelauw agar lebih memperhatikan Kebijakan Pembangunan tersebut dengan lebih baik lagi.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Pembangunan

### PENDAHULUAN

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Indraningsih, 2019).

Untuk mendorong kesatuan ekonominya maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah.) (Sakir, 2023a)

Menyatakan, bahwa Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di indonesia (Ramly et al., 2017).

Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi Wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya. Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali

pembangunan pertanian dan pedesaan. (Novia Tumilantouw et al., 2019), Menambahkan bahwa, di berbagai pelosok tanah air masih terdapat ribuan daerah pedesaan yang sangat timpang keadaannya termasuk negeri pelaw, dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber daya (Sutisna, 2013).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. (Nurdin & Rorimpandey, 2019) mengatakan bahwa mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Jadi Pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut, bukan hanya dengan bangunan-bangunan fisik saja yang menghiasi wilayah tersebut. (Alim et al., 2022) Bagaimana

mungkin membangun suatu gedung yang tinggi dan megah kalau fondasinya lemah? Kemudian bagaimana memulai pembangunan tersebut? Maka dalam hal ini, ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan, seperti yang terdiri dari faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan kewirausahaan serta teknologi (Kurniawan, 2022).

Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Strategi ini pernah dilakukan Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis tahun 1930-an. (Tay & Rusmiwari, 2019) atau contoh kasus di China yang saat ini melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan infrastruktur, yang dipadukan dengan strategi daya saing ekspor. Jadi, tidak salah jika pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya adalah apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif di Lapangan (Sakir, 2023b).

Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur itu sendiri (Studi et al., 2023).

Berangkat dari pernyataan di atas maka disini penulis mencoba membahas tentang, Studi Terhadap Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di

Negeri Pulauw adanya ketertarikan penulis untuk mengangkat judul ini dengan melihat fenomena yang terjadi di Negeri Pulauw, Kecamatan pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

ADD Telah selesai pengerjaan tetapi belum sepenuhnya bagian selesai. Masih ada beberapa yang belum selesai di kerjakan. Penulis melihat adanya indikasi implementasi pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik. Hal itu dapat dilihat pada kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat memprihatikan dan serta pembangunan gedung seperti rumah layak huni dan gedung posyandu dan peerangan jalan seperti lampu tenaga surya. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, masyarakat sangat resah tanpa adanya infrastruktur seperti gedung, rumah layak huni dan lain sebagainya (Jupir, 2013). Seperti yang kita ketahui bahwa gedung, rumah layak huni dan jalan merupakan infrastruktur perangkat keras yang artinya bahwa infrastruktur ini harus ada demi kemajuan ekonomi suatu daerah. Dengan ketiadaan infrastruktur diatas maka bisa dikatakan bahwa negeri Pulauw ini memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik.

Penulisan ini dikonsentrasikan pada implementasi program pembangunan infrastruktur pada unit gedung, rumah layak huni, dan jalan yang layak di negeri Pulauw, terlebih terkait dengan adanya keterhambatan pembangun sehingga pembangunan infrastruktur di Negeri Pulauw ini tidak terealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkajinya lebih jauh dalam satu penelitian dibawah sorotan judul: Implementasi Kebijakan Pembangunan

Infrastruktur Desa di Negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menyajikan satu gambaran secara terperinci tentang situasi khusus, setting sosial atau hubungan. Penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian dengan maksud mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang suatu fenomena yang terjadi di alam semesta dan/atau kehidupan manusia.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang situasi efektif tidaknya implementasi program pembangunan infrastruktur di negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah mulai dari proses penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai kepada proses pemantauan pembangunan desa ini.

Desa Pulauw dipilih menjadi lokasi penelitian dengan alasan fenomena penelitian ini terjadi pada lokus tersebut. Selama ini Desa Pulauw telah melakukan berbagai program pembangunan berupa jalan setapak, MCK dan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terdapat program Posyandu, PKK dan pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan namun beberapa tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur kurang berhasil sebagai mana layaknya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut pakar ilmu kebijakan public Enward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan

dari apa yang diputuskan oleh Legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam keyataannya, tahapan Implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain Implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Sakir & Pattimura, 2022)

Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni, posyandu, lampu jalan tenaga surya dan pagar kantor negeri. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dan segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat (Sakir, 2023a).

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu penulis melihat bahwa Negeri Pelauw masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur. Hal ini diperkuat dengan kondisi infrastruktur di Negeri Pelauw, gedungnya hingga kini masih belum ada perubahan, serta lampu tenaga surya dan pagar kantor desa yang belum terealisasi hingga saat ini.

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.(Sakir, 2023b) Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan infrastruktur di daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umumnya. Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari nilai yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan sebagainya (Tadaro,1992).

Ada tiga alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu pertama; pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju kearah rakyat dan negara adil dan makmur. Kedua; infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menunjukkan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya. Ketiga; pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan non fisik sejumlah wilayah (Mesak Lek, 2013).

#### **a. Kondisi Infrastruktur posyandu**

Pengertian posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Definisi posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam

upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana

Tujuan posyandu antara lain:

1. Menurunkan angka kematian bayi (AKB)
2. Angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan ifas
3. Membudayakan NKBS
4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
5. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ekonomi keluarga sejahtera

Kegiatan pokok posyandu:

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan diare

Kondisi infrastruktur posyandu di Negeri Pelauw kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah kini masih dikatakan minim. Karena belum adanya pembangunan gedung posyandu di tiap-tiap dusun. Pelaksanaan posyandu di tiap-tiap dusun hanya dilakukan di posko-posko kecil terdapat di tiap-tiap dusun adapila kegiatan posyandu dilakukan di gedung-gedung yang sudah lama di tinggalkan oleh pemiliknya.

Ada pun gedung posyandu yang telah didirikan di dusun I Negeri Pelauw tetapi belum dioperasikan atau belum ditempati karena masih belum sempurna pembangunan gedungnya serta kurangnya alat-alat kesehatan dan dan minimnya tenaga kesehatan di Negeri Pelauw.

## **b. Kondisi Infrastruktur Rumah Layak Huni**

Sebuah rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Kapan dan bagaimana sebuah rumah dapat dikatakan layak? sebuah konsep akademis dikemukakan untuk menjawab maksud sebuah perumahan dan pemukiman, pengertian layak boleh saja sangat subjektif, sehingga indikator layak bagi seseorang akan berbeda dengan orang lain, jelaslah bahwa layak itu bersifat relatif. Tentu saja dalam hal sebuah rumah dan pemukiman yang layak, harus dibatasi oleh pemaknaan yang dapat diterima secara objektif. Bertujuan agar bisa menjadi ukuran dalam rangka pengadaan rumah. Tidak hanya berlaku untuk yang berpenghasilan tinggi saja tapi juga bagi berpenghasilan rendah.

Rumah yang layak huni harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi fisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi.

Secara teoritis cukup sangat mudah menemukan kriteria rumah yang layak untuk dihuni. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, peerangan, sinitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktifitas penghuninya untuk meraih produktifitas. Indikator layak diantaranya: filosofis, sosiologis, dan legalitas:

1. Segi filosofis, dapat dikatakan bahwa rumah merupakan kebutuhan hakiki bagi makhluk hidup, selain sandang dan pangan, untuk menjaga eksistensi dan tempat berlindung bagi penghuninya.
2. Segi sosiologis, rumah harus menjadi tempat bagi penghuninya untuk beraktifitas yang produktif
3. Segi legalitas, harus ada jaminan kepastian hukum bagi penghuninya, sebagai tempat untuk berdiam, karena menyadari bahwa rumah itu miliknya secara sah. Penghuninya tidak khawatir bahwa sewaktu-waktu rumahnya akan dirampas, diusir atau digusur. Hanya bila saja rumah yang layak dari segi fisik saja, yaitu apakah cukup dengan beralaskan tanah, beratap jerami dan berdinding anyaman bambu?

Rumah layak huni Dari segi kesehatan terdapat beberapa prinsip yaitu: Maksimalkan cahaya matahari. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan dengan optimal bila memperhatikan: - Orientasi bangunan memperhatikan lintasan matahari. Bangunan sebaiknya mengarah ke utara atau ke selatan untuk menghindari radiasi panas matahari langsung - Ukuran ruangan dan bukaan jendela. Buka jendela yang lebar dianjurkan, lebar 2 kali tinggi ruangan, bertujuan agar cahaya/radiasi matahari maksimal masuk ke dalam ruangan. Minimal intensitas cahaya di ruangan 60 lux dan tidak menyilaukan.

Ventilasi alami. Ventilasi bertujuan agar sirkulasi udara terjadi dalam ruangan secara alamiah. Ventilasi pada dinding minimal terdapat dibagian bawah dan atas, bagian bawah untuk masuk udara sejuk dan bagian atas untuk keluar udara hangat. Luas

lubang udara (ventilasi) minimal 10% dari luas lantai. Aliran udara ini akan mendorong udara hangat dan CO<sub>2</sub> keluar ruangan rumah.

Bagian-bagian ruang. Bagian-bagian ruang seperti: lantai dan dinding tidak lembap serta tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor maupun udara kotor.

Komponen-komponen dalam ruangan. Komponen-komponen dalam ruangan seperti: Lantai, kedap air dan mudah dibersihkan, dinding dan langit-langit rumah harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan, memiliki bumbungan rumah penangkal petir, ruangan rumah harus ditata agar berfungsi sebagai sarana pembuangan asap.

Manajemen limbah. Manajemen limbah bertujuan agar prsediaan air bersih rumah tidak tercemar, artinya: - Limbah cair yang berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah - Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap permukaan tanah dan air tanah.

Penampungan air hujan. Air hujan yang tertampung itu digunakan untuk: - Menyiram kebun bunga - Menyiram toilet - Pembersihan kendaraan dan lain-lain. Cara ini akan megefisiensikan/menghemat air dari PDAM atau air yang diambil dari tanah (dipompa) atau sumur.

Lapisan permukaan tanah. Lapisan permukaan tanah bangunan tembus air (air dapat merembes), jadi hindari permukaan tanah sekitar rumah yang kedap air. Ini bertujuan untuk menambah persediaan air tanah dan/atau mengurangi genangan air/banjir dimusim hujan.

Terdapat sarana penyimpanan makanan yang aman dan higienis, tidak terdapat hewan penular penyakit, seperti sarang tikus di rumah dan lain lain. Menurut peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang standar pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah, Provinsi Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa: Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kondisi rumah layak huni di Negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah semua hampir selesai namun ada pula beberapa rumah yang belum terselesaikan secara optimal dan juga harus memakan waktu yang sangat lama akibat banyaknya adat budaya dan tradisi yang terjadi di negeri Pulauw sehingga membuat para pekerja seringkali meninggalkan pekerjaannya hingga berbulan-bulan.

### **c. Kondisi Infrastruktur Lampu Tenaga Surya**

Lampu tenaga surya adalah sebuah lampu yang menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang. Lampu tenaga surya dapat digunakan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Bagi yang di luar ruangan biasanya di gunakan untuk dekorasi taman sedangkan yang di dalam ruangan digunakan sebagai penerangan di garasi.

Lampu taman surya yang digunakan untuk dekorasi dibuat dengan banyak model dan desain serta mengandung unsur seni. Bentuk lampu taman surya sangat bervariasi

ada yang berbentuk seperti hewan atau dengan desain yang bertema liburan. Lampu ini sering di gunakan untuk menandai jalan setapak atau daerah sekitar kolam renang. Saat siang hari lampu tenaga surya mengisi ulang baterainya yang akan digunakan pada malam hari. Pada saat menjelang malam, lampu ini akan secara otomatis menyala dan ada beberapa menyalah secara manual. Batas waktu menyalah sekitar 8-10 jam tergantung berapa banyak sinar matahari yang diperoleh saat siang hari.

Kondisi lampu tenaga surya di Negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ini memanglah sudah tersedia di beberapa daerah-daerah tertentu tetapi hanya berfokus pada daerah-daerah yang ramai atau di daerah pusat Negeri. Ada pula beberapa lampu tenaga surya yang sudah dipasang tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menjadi pertanyaan dari penduduk Negeri yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Ada juga beberapa dusun yang ada di Negeri Pulauw yang belum dipasangkan lampu tenaga surya.

### **d. Kondisi Infrastruktur Pagar Kantor Desa**

Kegiatan pembangunan pagar kantor desa negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan gotong royong bersama masyarakat, dengan tujuan untuk memperindah kantor desa dan memberikan fungsi keamanan, kenyamanan. Pembangunan pagar meliputi pembangunan papan nama kantor desa, pemasangan teralis besi serta penanaman tanaman untuk lebih memperindah bangunan pagar. Penting bagi masyarakat

negeri Pulauw membangun papan nama, sekaligus pagar ini dikarenakan rasa ingin memiliki kantor desa sebagai pusat keinginan masyarakat negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Kondisi infrastruktur pagar kantor desa saat ini telah hampir selesai dikerjakan namun ada beberapa faktor penghambat sehingga pengerjaan pagar kantor desa menjadi terkendala di beberapa bagian samping kantor desa kendala-kendala tersebut meliputi agenda-agenda adat dan budaya di negeri Pulauw serta cuaca-cuaca yang sering terjadi di negeri Pulauw sehingga pengerjaan seringkali tertunda hingga berbulan-bulan.

### KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa di negeri Pulauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah adalah langkah krusial dalam memajukan daerah tersebut. Dari penelitian dan analisis, dapat diambil beberapa kesimpulan penting:

1. Pentingnya infrastruktur untuk Pembangunan: Infrastruktur yang baik, seperti jalan, air bersih, dan energi listrik, merupakan fondasi yang diperlukan untuk memajukan desa. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, perizinan, dan pembebasan lahan bisa memperlambat proses. Oleh karena itu,

perlu upaya yang kuat dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat untuk mengatasi hambatan ini.

3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur adalah kunci keberhasilan. Masyarakat harus merasa memiliki proyek ini dan memiliki pemahaman yang baik tentang manfaatnya.
4. Koordinasi yang Efektif: Koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan kontraktor, sangat penting dalam menjalankan proyek infrastruktur dengan lancar. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah proyek infrastruktur selesai, pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang diharapkan. Perbaikan dan pemeliharaan rutin juga harus dilakukan.
6. Dampak Positif: Dengan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Ini akan mengangkat Negeri Pulauw ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam rangka mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi pembangunan infrastruktur desa, penting bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan

masyarakat di negeri Pulauw untuk terus bekerja sama dengan baik. Hanya dengan kerja sama yang kuat, evaluasi yang terus-menerus, dan fokus pada manfaat jangka panjang, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ini akan berhasil mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan. *Seminar Nasional 2022 "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi,"* 1(1), 1689–1699.
- Indraningsih, G. . K. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility,* 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.36417/jpp.v1i1.257>
- Jupir, M. M. (2013). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT). *J.Ind. Tour. Dev. Std,* 1(1), 1–10. <http://jitode.ub.ac.id>
- Kurniawan, R. (2022). URGENT Analisis Dampak Ekonomi Dari Implementasi Kebijakan Tol Laut Di Wilayah Timur Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gresik,* 11, 968–977.
- Novia Tumilantouw, Mandagi, M., & Bogar, W. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Optimization. *Jurnal Mirai Management,* 4(2), 122–136.
- Nurdin, I., & Rorimpandey, M. C. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan,* 1–13. <https://doi.org/10.33701/jt.v1i1.630>
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017,* 1(Oktobre), 379–392.
- Sakir, A. R. (2023a). *Birokrasi dan Governansi Publik.* Mitra Ilmu Makassar. [www.mitrailmumakassar.com](http://www.mitrailmumakassar.com)
- Sakir, A. R. (2023b). *Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Pengembangannya* (p. 153). Defa Media. [www.defamediapustaka@gmail.com](http://www.defamediapustaka@gmail.com)
- Sakir, A. R., & Pattimura, U. (2022). *TENGAH EMPOWERMENT OF THE POOR BY THE SOSIAL WELFARE OFFICE IN LETWARU VILLAGE , MASOHI DISTRICT , CENTRAL MALUKU* Salah satu kewajiban Pemerintah yakni melakukakn penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat raky. 3(1), 1–10.
- Studi, P., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Studi, P., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN*



*TATA GUNA AIR IRIGASI (P3TGAI)  
DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA  
JATIDROJOG KECAMATAN  
KEDUNGPRING KABUPATEN  
LAMONGAN. 11(4), 2504–2518.*

Sutisna, W. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Daerah. *Jurnal*

*Desentralisasi, 11(2), 419–432.*  
<https://doi.org/10.37378/jd.2013.2.419-432>

Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(4), 217–222.*